

ARTIKEL

**PENGARUH KINERJA PEMERINTAH DESA, DAN KESADARAN
MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP
KEPATUHAN MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PADA DESA BADALPANDEAN KECAMATAN NGADILUWIH
KABUPATEN KEDIRI**



Oleh:

ANDRI KHUNAIFI

14.1.02.01.0245

Dibimbing oleh :

- 1. SIGIT PUJI WINARKO., S.E., M.Ak**
- 2. FAISOL., M.M**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2019**

SURAT PERNYATAAN
ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Andri Khunaifi
NPM : 14.1.02.01.0245
Telepun/HP : 085859149495
Alamat Surel (Email) : andrysandykya02@gmail.com
Judul Artikel : Pengaruh Kinerja Pemerintah Desa, Dan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Desa Badalpendean Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri”
Fakultas – Program Studi : Ekonomi - Akuntansi
NamaPerguruan Tinggi : Universitas Nusantara PGRI Kediri
Alamat PerguruanTinggi : JL. K.H Achmad Dahlan No. 76 Kediri

Dengan ini menyatakan bahwa:

- artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiarisme;
- artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri, 31 Juli 2019
Pembimbing I  SIGIT PUJI WINARKO., S.E., M.Ak NIDN. 0716057101	Pembimbing II  FAISOL., M.M NIDN. 712046903	Penulis,  ANDRI KHUNAIFI NPM. 14.1.02.01.0245

**PENGARUH KINERJA PEMERINTAH DESA, DAN KESADARAN
MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP
KEPATUHAN MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PADA DESA BADALPANDEAN KECAMATAN NGADILUWIH
KABUPATEN KEDIRI**

Andri Khunaify

14.1.02.01.0245

Ekonomi - Akuntansi

andrysandykya02@gmail.com

Sigit Puji Winarko, S.E., M.Ak¹, Faisol, M.M.²

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Andri Khunaifi : Pengaruh Kinerja Pemerintah Desa dan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Desa Badalpandean Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri (Studi Kasus Pada Desa Badalpandean Kecamatan Ngadiluwih). Skripsi, Akuntansi, FE UN PGRI Kediri, 2018.

Kata kunci : *Kinerja Pemerintah Desa, Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi Bangunan, dan Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*

Penelitian ini dilatar belakangi bahwa keberadaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu jenis pajak dapat dimengerti mengingat bumi dan bangunan telah memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai sesuatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan tersebut. Kinerja Pemerintah desa juga dianggap penting dalam pemungutan PBB karena Pemerintah desa berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai wajib pajak. Selain itu, kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Permasalahan penelitian ini adalah 1) Apakah secara parsial kinerja pemerintah desa berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Desa Badalpandean Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri ? 2) Apakah secara parsial kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada Desa Badalpandean Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri ? 3) Apakah secara simultan kinerja pemerintah desa dan kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) berpengaruh terhadap Kepatuhan masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) pada Desa Badalpandean Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 92 pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk menggunakan teknik *simple random sampling* dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan *software SPSS for windows versi 23*.

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah 1) Kinerja pemerintah desa secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Desa Badalpandean Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. 2) Kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada Desa Badalpandean Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. 3) Kinerja pemerintah desa dan kesadaran masyarakat



membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) pada Desa Badalpandean Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

I. LATAR BELAKANG

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Amanah, 2015). Oleh karena itu perlu adanya peningkatan peran serta masyarakat. Menurut Puspita (2014), pajak ini bersifat kebendaan, artinya besaran pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/dan atau bangunan, semakin Luas tanah yang dimiliki semakin banyak pajak yang harus di bayar.

Keberadaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu jenis pajak dapat dimengerti mengingat bumi dan bangunan telah memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai sesuatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan tersebut. Salah satu cara mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan dalam penerimaan pajak. Masalah kepatuhan

menjadi masalah klasik yang hampir dihadapi semua Negara yang menerapkan sistem perpajakan. Selain masalah rendahnya tingkat pembayaran, kemudahan pembayaran pajak, kualitas pelayanan, dan waktu yang diperlukan untuk mengurus perpajakan juga belum berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan sistem tersebut wajib pajak dituntut keaktifannya mulai dari saat mendaftarkan diri, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang tepat pada waktunya. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak benar-benar penting untuk merealisasikan suatu daerah atau kota.

Kinerja Pemerintah desa juga dianggap penting dalam pemungutan PBB karena Pemerintah desa berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai wajib pajak. Dari mulai penyerahan SPPT sampai pemungutan pembayaran PBB oleh wajib pajak selalu berhubungan dengan Pemerintah desa. Oleh karena itu Pemerintah desa harus selalu memberikan motivasi dan sosialisasi secara merata kepada masyarakatnya untuk selalu membayar Pajak Bumi Bangunannya. Budaya kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah

harus ditanamkan sejak dini oleh pemerintah desa kepada masyarakat agar menjadi pribadi-pribadi yang taat untuk membayar pajak, terutama Pajak Bumi dan Bangunan (Prayoga,2017)

Selain Kinerja pemerintah desa, Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak(Suyatmin,2004). Seseorang dikatakan memiliki kesadaran pajak antara lain apabila mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan dan mau mematuhi, mengetahui fungsi pajak untuk mensejahterakan rakyat, menghitung, membayar, melaporkan pajak tepat waktu dan secara sukarela tanpa paksaan (Santi,2013).

Berikut data Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Badalpandean Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri :

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak Terhutang di Desa Badalpandean Kecamatan Ngadiluwih

Tahun Pajak	Wajib Pajak PBB	Hasil Pungutan	Prosentase
2015	1.099	965	88%
2016	1.099	965	88%
2017	1.099	950	83%

Sumber : data diolah 2019

Berdasarkan tabel 1.1 tentang Pendapatan Masyarakat Desa Badalpandean Kec.

Ngadiluwih Kabupaten Kediri yang diperoleh dari data Kantor Kepala Desa Badalpandean bahwa adanya penurunan dari tahun 2015 sampai dengan 2017.

Beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya tingkat realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan sarana prasarana yang tidak merata, dan kurangnya sosialisasi tentang pajak bumi dan bangunan dari pemerintah desa.

Kepala Kelurahan yang merupakan salah satu mata rantai dan pihak yang berkewajiban dari alur penarikan Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini menjadi sangat penting dan relevan untuk diteliti mengingat keberadaan lurah merupakan penguasa pemerintah yang terendah sehingga langsung bersinggungan dengan masyarakat.

Melihat dari fenomena diatas tidak hanya kepatuhan wajib pajak yang menjadi kendala bagi masyarakat, tapi juga Kinerja pemerintah desa yang kurang optimal untuk mensosialisasikan tentang pentingnya membayar pajak, terutama pajak bumi dan bangunan, hal ini juga dikemukakan oleh Rongkone (2015) telah melakukan penelitian Kinerja Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Pineleng I Kecamatan

Pineleng. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa sangat berperan positif bagi masyarakat untuk membayar pajak, namun masih terdapatnya kendala pada kinerja pemerintah, dimana kurangnya sosialisasi terhadap pajak bumi dan bangunan tersebut.

Dalam kaitan dengan kewajiban ini seorang kepala Kelurahan harus mempunyai cara untuk mengatasi persoalan masyarakat terhadap pajak baik tingkat Kinerja pemerintahan maupun kesadaran masyarakat untuk membayar pajak ataupun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pajak pada pembiayaan roda pembangunan. Dengan melihat realitas di atas, merasa perlu untuk melihat seberapa jauh peranan lurah dalam hal peningkatan kedisiplinan masyarakat terhadap kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan memberikan judul pada tugas penulisan skripsi ini berupa :

“PENGARUH KINERJA PEMERINTAH DESA, DAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP KEPATUHAN MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA DESA BADALPANDEAN KECAMATAN NGADILUWIH KABUPATEN KEDIRI”

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Diduga Kinerja Pemerintah Desa berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB

H₂ : Diduga Kesadaran Masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB

H₃ : Diduga Kinerja Pemerintah Desa dan Kesadaran Masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB

II. METODE

A. Pendekatan dan Teknik Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Sugiyono (2012:23),”dikatakan metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka- angka dan analisis menggunakan statistic.”

2. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian asosiatif kausal.

Menurut Sugiyono (2016:14), “metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, analisis data bersifat kuantitatif atau statistic, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian merupakan suatu lokasi atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil tempat di Kantor Sekertariat Program Nasional Peremberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan yang beralamat di Desa Juwono Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.

2. Waktu Penelitian

Waktu digunakan dalam penelitian ini selama 1 bulan terhitung sejak bulan April 2018 pada saat pengambilan data pertama mengenai sejarah dan gambaran umum Kantor Sekertariat Program Nasional Peremberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Desa Juwono Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk sampai tanggal

Mei 2018 untuk pengambilan sampel dari kredit dana bergulir, modal sendiri dan pendapatan masyarakat Desa Juwono Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Di dalam penelitian ini yang dimaksud dengan populasi adalah Seluruh masyarakat Desa Badalpandean Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri yang memiliki SPPT NOP PBB.

Sampel

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Simple Random Sampling* dengan menggunakan Rumus Slovin sebagai berikut (Sugiyono, 2016:57) :

$$n = \frac{N}{1 + N (\alpha^2)}$$
$$n = \frac{1099}{(1 + 1099 (0,1)^2)} = \frac{1099}{11,99} = 91,36$$
$$= 92$$

D. SUMBER DATA

Data Primer

sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Data penelitian ini yaitu dengan menyebar angket

atau kuesioner yang langsung diberikan kepada wajib pajak Desa Badalpandean Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.”

E. Teknik Analisis data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi (R²) dan uji hipotesis (uji t dan uji F)

III. HASIL DAN KESIMPULAN

A. Hasil Penelitian

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel dependen dan variabel independen, maka digunakan model regresi linier berganda

Tabel 1

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	6.596	.997
X1	.210	.102
X2	.609	.074

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer diolah peneliti, 2019

Berdasarkan tabel 1 ditetapkan bahwa model regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$\hat{Y} = 6,596 + 0,210X_1 + 0,602X_2 + \epsilon$$

Berikut hasil pengujian secara parsial menggunakan uji t yang nilainya dibandingkan dengan signifikansi 0,05 atau 5%

Tabel 2

Hasil Uji t

Model	t	Sig.
1 (Constant)	6.619	.000
X1	2.056	.003
X2	6.175	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer diolah peneliti, 2019

Berdasarkan tabel hasil uji pada tabel 2 Dapat diketahui bahwa secara parsial sistem kinerja pemerintah desa (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y) mempunyai signifikansi 0,003 yang berarti bahwa signifikansi kurang dari 0,05 (0,003 < 0,05), maka H_a diterima dan H₀ ditolak artinya kinerja pemerintah desa secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dapat diketahui bahwa secara parsial kesadaran masyarakat membayar pajak (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y) mempunyai nilai signifikansi 0,000 yang berarti bahwa signifikansi kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka H_a diterima dan H_0 ditolak artinya kesadaran masyarakat membayar pajak secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Berikut hasil pengujian secara simultan menggunakan uji F yang nilainya dibandingkan dengan signifikansi 0,05 atau 5%

Tabel 3
Hasil Uji F

ANOVA^b

Model	F	Sig.
1 Regression	9.303	.000 ^a
Residual		
Total		

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer diolah peneliti, 2019

Berdasarkan tabel 3 di atas diketahui nilai F hitung pada variabel kinerja pemerintah desa (X1), kesadaran masyarakat membayar pajak (X2) sebesar 0,000 yang berarti bahwa signifikansi kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka H_a diterima dan H_0 ditolak artinya kinerja pemerintah desa dan kesadaran masyarakat membayar pajak secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pembahasan Hasil Pengujian Statistik

Dari hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pada hipotesis pertama yang menyatakan bahwa diduga kinerja pemerintah desa berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB mempunyai nilai signifikansi 0,003. Hal ini membuktikan bahwa variabel kinerja pemerintah desa merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB, artinya setiap adanya peningkatan kinerja pemerintah desa akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB, begitupun sebaliknya jika tidak ada pelaksanaan kinerja pemerintah desa maka kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB akan menurun. Hal ini sejalan dengan pendapat Mangkunegara (2007) yang menyatakan bahwa kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam bidang Desa seorang kepala desa memiliki tugas-tugas dan pelayanan yang cukup berat, apalagi dengan adanya realisasi Otonomi Daerah membawa kompleksitas bagi pelaksanaan tugas-tugas di Desa. Maka dengan itu peran

pemerintah dalam hal pengawasan penyelenggaraan pemerintah di Desa sangat penting tapi juga harus diimbangi dengan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan untuk menintegrasikan kehidupan masyarakat-masyarakat itu dan memampukan mereka untuk memberi sumbangan secara penuh untuk kemajuan nasional. Peran pemerintah juga dalam hal pemungutan perpajakan diperlukan untuk memajukan kesejahteraan suatu bangsa Indonesia

Pada hipotesis kedua yang menyatakan bahwa kesadaran masyarakat membayar pajak secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB mempunyai nilai signifikansi 0,000. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat membayar pajak merupakan penjabar yang signifikan terhadap variabel kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB, artinya setiap adanya peningkatan kesadaran masyarakat membayar pajak akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB, begitupun sebaliknya jika tidak ada kesadaran masyarakat membayar pajak maka kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB akan menurun. Hal ini sesuai dengan pendapat Siahaan (2010) yang menyatakan bahwa Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat erat hubungannya

dengan kesadaran bernegara, kesadaran bernegara kurang maka masyarakat kurang dapat mengenal dan menikmati pentingnya berbangsa dan bertanah air, berbahasa nasional, menikmati keamanan dan ketertiban, memiliki dan menikmati kebudayaan nasional dan pada akhirnya apabila kesadaran bernegara kurang maka rasa memiliki dan menikmati manfaat pengeluaran pemerintah jugakurang sehingga kesadaran membayar pajak juga berkurang. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak.

Pada hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa kinerja pemerintah desa dan kesadaran masyarakat membayar pajak secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB mempunyai nilai signifikansi F sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi F hitung kurang dari 0,05 yang berarti bahwa kinerja pemerintah desa dan kesadaran masyarakat membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB. Kepatuhan Wajib Pajak



dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel kinerja pemerintah desa dan kesadaran masyarakat membayar pajak sebesar 73,8%, sedangkan sisanya sebesar 26,2% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Daftar Pustaka

- Budhiartama, jati. 2016. Pengaruh sikap, kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan pada kepatuhan membayar Pajak Bumi Dan Bangunan *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* (<http://jimfeb.udayana.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1143>). Diunduh 14 Oktober 2018
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM. SPSS 19*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Herawati, Yadnyana 2016. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Pbb-P2 Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana) *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* (<https://media.neliti.com/media/publications/29950>). Diunduh 14 Oktober 2018
- Ilyas, W.B dan R.Burton 2010. *Hukum Pajak Edisi 5*. Salemba Empat, Jakarta
- Juliandi, Azuar. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Bisnis*. Medan: M2000.
- Mardiasmo.2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi Ofset, Yogyakarta.
- Nafiah, Warno. 2018. Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016) *Jurnal STIE Semarang*. (<http://e-journal.uajy.ac.id/4856/>). Diunduh 14 Oktober 2018.
- Nurmantu, Safiri.2005. *Pengantar Perpajakan*.Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Noor, Juliansyah. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Paulo Freira. Pengertian Kesadaran. (Senin, 06 November 2018; Pukul 15:01:38) <http://id.Wikipedia.org/wiki/Pajak>
- Riduwan. 2012. *Dasar-Dasar Statistika*. Cetakan kesepuluh. Bandung: Alfabeta
- Santoso, Singgih. 2012. Analisis SPSS pada Statistik Parametrik. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sumarsan, Thomas.2013. *Perpajakan Indonesia* (Vol.13). Jakarta : PT Indeks
- Sugiyono. 2011.*Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan. Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*.Bandung :Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung :Alfabeta,
- Waluyo.2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.